

Tawaran Pemerintah Ditolak Mentah

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

kepada wartawan, Kamis (25/3).

Dadang mengatakan, ia menilai harga tanah diharapkan hanya Rp 200 ribu, padahal harga pasarnya sudah melambung tinggi. Pihaknya tidak muluk-muluk hanya menuntut harga yang layak sesuai pasaran yaitu Rp 1,6 juta.

"Kami sudah enam bulan menuntut sesuai pasaran dan sudah bosan tidak ada tanggapan, hanya minta kepastian serta keadilan. DPRD Karawang sudah mengundang pihak-pihak terkait namun tidak ada yang datang satu pun," jelasnya.

Lanjut Dadang, para warga hanya ditawarkan ganti rugi yang sangat murah yak-

ni dari Rp100 ribu hingga Rp350 ribu permeternya. Padahal harga pasaran tanah di wilayah yang dilintasi jalan provinsi untuk Karawang, Bogor dan Cianjur tersebut memiliki nilai harga Rp1 juta hingga Rp2,5 juta permeternya.

Sebelumnya, Ketua Paguyuban Masyarakat Citaman Bersatu Didin M Muchtar mengatakan, sedikitnya ada 65 kepala keluarga Kampung Citaman yang harus tergusur karena proyek Tol Jakarta-Cikampe II. Mereka menempati lahan seluas 45 hektar dengan 80 bidang tanah.

"80 persen sudah ada bangunan dan sebagian merupakan lahan kosong," ungkap Didin, Sabtu (2/1)

"Kami tidak tanda tangani tawaran dari pemerintah. Padahal ini merupakan rumah kita dan kami tidak ingin harganya disamakan dengan lahan kosong apalagi hutan," ungkap Didin.

"Aturannya sudah jelas, kami bekerja sesuai aturan. Dalam aturan, kami tidak ikut menentukan nilai tanah. Karena sudah ada yang mengurus penentuan harga secara teknis," ujar Kepala BPN Karawang Fitriyani Hasisuban, usai mediasi bersama warga di kantornya, Kamis (25/3).

Lanjut Fitriyani, secara aturan memang ada proses musyawarah bentuk ganti rugi. Namun, musyawarah tersebut tidak membahas soal besaran nominal ganti rugi, melainkan bentuk gan-

ti rugi. Bisa dalam bentuk uang, maupun tanah pengganti.

"Secara aturan, selama 14 hari setelah musyawarah pemberitahuan ganti rugi, (kalau warga tidak sepakat) harus masukkan gugatan ke Pengadilan. Nanti keputusan di pengadilan. Ketika 14 hari tidak ada gugatan, BPN kemudian akan bersurat ke PUPR," jelasnya.

Saat ini, dari 1.600 bidang tanah dari total delapan desa yang terdampak proyek pembangunan tol Japek II sisi Selatan, hanya tersisa 56 bidang tanah yang menolak ganti untung. BPN juga menyangkal tuduhan intimidasi ke warga Tamansari. "Tidak ada intimidasi oelh kami. Kami tidak ada waktu melakukan itu," pungkasnya. **(rie/mhs)**